



APBD 2016 Akhirnya Disahkan

Porsi Belanja Tak Langsung Masih Cukup Besar ✓



SIDANG paripurna kemarin saat APBD induk 2016 akhirnya diketuk palu.

SINGARAJA, NusaBali

Setelah melewati pembahasan secara maraton, APBD Buleleng tahun 2016, akhirnya ketok palu alias disetujui dan disahkan, Kamis (12/11) pagi melalui sidang paripurna DPRD. Total pendapatan daerah naik menjadi Rp 2,1 triliun dibanding tahun 2015 hanya sebesar Rp 1,9 triliun. Dari kenaikan itu, porsi belanja tidak langsung masih lebih tinggi dibanding porsi belanja langsung.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna, dihadiri oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama unsure Mudpida dan pejabat SKPD lingkup Pemkab Buleleng.

Dalam APBD 2016 itu, sumber pendapatan daerah yang alami kenaikan meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak 3,40 persen dibanding tahun 2015 lalu, menjadi Rp 273 miliar lebih,

kemudian dana alokasi khusus (DAK) naik menjadi Rp 119 miliar lebih atau naik 34,39 persen dibanding tahun sebelumnya dan kenaikan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 982 miliar, atau naik sebesar 13,15 persen dari tahun sebelumnya, termasuk kenaikan pendapatan lain-lainnya. Sehingga total pendapatan daerah menjadi Rp 2,1 triliun.

Kendati pendapatan daerah alami kenaikan, namun porsi belanja tidak langsung masih lebih tinggi dibanding porsi belanja langsung dengan perbandingan 63,04 persen dibanding 36,96 persen. Terhadap kondisi itu, hampir seluruh fraksi di DPRD Buleleng meminta agar kedepan dilakukan efisiensi pada belanja tidak langsung.

Sehingga komposisi APBD bisa seimbang antara porsi belanja tidak langsung dengan porsi belanja langsung dengan

perbandingan 60 persen dibanding 40 persen. Masalahnya dengan komposisi belanja langsung hanya 36,96 persen berpengaruh terhadap belanja modal yang minim.

"Ke depan perlu efisiensi dalam bidang belanja barang dan jasa serta belanja pegawai pada belanja langsung sehingga belanja modal dapat ditingkatkan," kata juru bicara gabungan Fraksi Golkar, Demokrat dan Gerindra, Mangku Made Ariawan.

Sedangkan gabungan Fraksi PDIP, Hanura, dan Nasdem melalui juru bicaranya Hj Mulyadi Putra menilai komposisi itu hal yang wajar dan

realistis, karena pada belanja langsung terdapat rincian obyek belanja berupa kegiatan pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa yang dapat dinikmati masyarakat.

Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan, efisiensi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai akan terus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan, namun untuk mendapat multiplier efek bagi peningkatan perekonomian tidak mesti belanja modal, karena semua belanja baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya memberi dampak ekonomi yang luas.

"Penyusunan alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung telah sesuai dengan ketentuan penyusunan APBD tahun 2016, namun kedepan penyusunan itu akan diupayakan mencapai perbandingan 60 berbanding 40 persen," kata Bupati. **k19**

Edisi : Jumat, 13 November 2015

Hal : 4



Dana Pilkada ✓ Dipangkas, KPU Kurangi Lembur

SINGARAJA, NusaBali

Dana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2017, yang diajukan KPU Buleleng di tahun 2016, berkurang sebesar Rp 4 miliar. KPU pun harus mengurangi anggaran lembur dan biaya konsumsi.

Semula KPU Buleleng ajukan usulan kebutuhan dana Pilkada 2017, sebesar Rp 46,7 miliar. Kebutuhan dana itu diusulkan kepada Pemkab Buleleng agar bisa diakomodir pada APBD tahun 2016, karena tahapan sudah dimulai di tahun 2016.

Rencananya pencoblosan akan digelar pada bulan Pebruari 2017. Dalam pembahasan RAPBD 2016, usulan KPU itu sempat dibahas alot. Selain masalah alokasi kebutuhan yang diusulkan cukup besar, Pemkab juga sulit mengakomodir keseluruhan usulan itu ditahun 2016. Pemkab merancang dua tahun anggaran yakni tahun 2016 dan 2017 untuk mengakomodir kebutuhan anggaran Pilkada yang diusulkan KPU. Sedangkan KPU sendiri khawatir, jika dirancang dua tahun anggaran, kebutuhan dana di awal tahun 2017 bakal keteteran karena proses APBD baru bisa direalisasikan di bulan ketiga atau Maret.

Nah setelah ada pembahasan lebih lanjut, KPU akhirnya bisa menerima opsi kebutuhan anggaran itu dirancang dalam dua tahun anggaran yakni di tahun 2016 dan tahun 2017. Selain dirancang dua tahun anggaran, KPU bersama tim anggaran eksekutif juga merasionalisasi usulannya hingga turun sebesar Rp 4 miliar.

Kepastian itu setelah APBD Induk 2016 ketok palu, Kamis (12/11) pagi melalui sidang paripurna DPRD Buleleng. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buleleng Dewa Ketut Puspaka usai sidang paripurna mengatakan, untuk tahun 2016 pihaknya hanya bisa mengakomodir kebutuhan anggaran KPU sebesar Rp 25,6 miliar. Itu pun lanjut Puspaka, dialokasikan dalam dua tahap yakni di APBD induk sebesar Rp 23 miliar dan di APBD Perubahan sebesar Rp 2,6 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp 17 miliar, akan dialokasikan di APBD Induk tahun 2017 nanti. "Sudah, sudah final, tim kecil kita juga sudah membahas beberapa item yang bisa dirasionalisasi," katanya.

Sekkab Puspaka juga mengungkapkan, di APBD Induk 2016 pihaknya juga sudah alokasikan kebutuhan anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp 6 miliar dan kebutuhan pengamanan sebesar Rp 5 miliar.

Sementara Ketua KPU Buleleng I Gede Suardana dikonfirmasi terpisah mengatakan, rasionalisasi usulan sebesar Rp 4 miliar tidak akan mengganggu proses pelaksanaan Pilkada. Dikatakan, rasionalisasi itu hanya menyangkut kebutuhan internal seperti uang lembur dan biaya konsumsi. "Dari hitung-hitungan kita, semuanya (kebutuhan anggaran, red) sudah sesuai ketentuan, jadi tidak mengganggu, karena yang dirasionalisasi itu alokasi dana lembur dan biaya konsumsi saja, kalau lainnya tidak ada yang dirasionalisasi," terangnya.

Kendati demikian, Suardana kembali mengingatkan agar kebutuhan dana di tahun 2017, bisa tersedia sesuai kebutuhan. Karena, kebutuhan anggaran di tahapan tersebut sangat krusial untuk menopang proses Pilkada. k19

Edisi : Jumat, 13 November 2015

Hal : 4



DCK 'Bidik' Proyek Puskesmas Abiansemal I

★ Jika Proyek Molor,

Siap Jatuhkan Pinalti Rp 17 Juta Perhari

Penyebab keterlambatan, karena memang proyek dimulai belakangan. Saat kontrak lain sudah jalan, proyek Puskesmas Abiansemal baru mulai.

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Badung ancap-ancang menjatuhkan sanksi pinalti kepada rekanan bila tak menuntaskan pengerjaan proyek, hingga batas waktu yang ditentukan. Salah satu yang menjadi perhatian DCK adalah pembangunan Puskesmas Abiansemal I di Desa Blahkiuh, Abiansemal, Badung. Pasalnya, progres proyek bernilai Rp 17 miliar itu cukup lambat, sekarang baru 68 persen.

Proyek fisik dibawah leading sector DCK rata-rata berakhir akhir tahun ini. Proyek yang ditangani langsung DCK, diantaranya pembangunan gedung aset di Puspem Badung. Proyek ini menyedot dana Rp 4,08 miliar. Kemudian proyek gedung Paviliun Mangusada atau gedung E RSUD Badung. Kemudian pembangunan kantor Camat Mengwi dengan nilai kontrak Rp 7,4 miliar. Penataan Kawasan Daya

Tarik Wisata Taman Mumbul Desa Sangeh. Proyek pembangunan kantor Camat Petang dan Pembangunan Gedung Klinik Ibu dan Anak Puskesmas Petang I. Bahkan beberapa proyek sudah rampung pengerjaannya, sebut saja pembangunan gedung Pa-

viliun Mangusada.

Kepala DCK Kabupaten Badung, Ni Putu Dessy Darmayanti, Kamis (12/11), mengaku proyek was-was atas proyek pembangunan Puskesmas Abiansemal I. Menurut dia, walaupun pihak rekanan optimis mam-

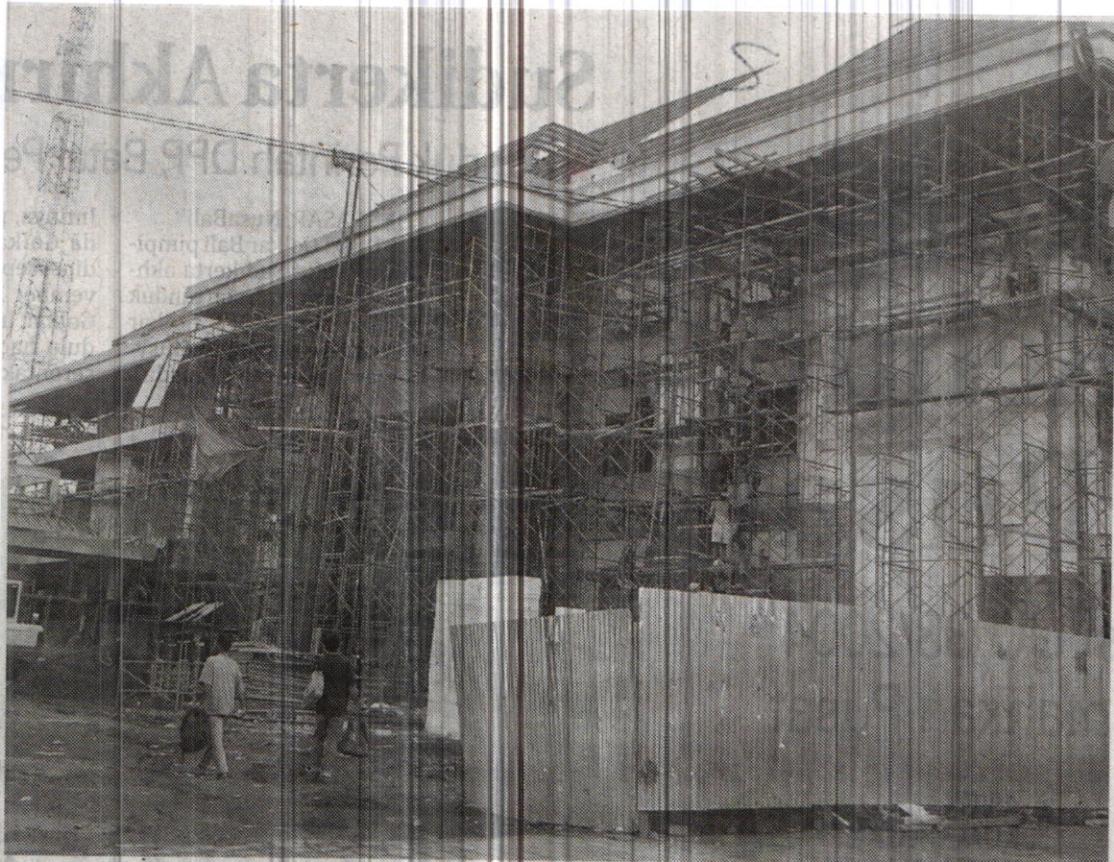
pu menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai dengan kontrak kerjasama 23 Desember 2015 mendatang, namun pejabat asal Denpasar justru sebaliknya. "Kalau rekanan optimistis, tapi kami tidak. Kami sendiri khawatir," katanya.

Edisi : Jumat, 13 November 2015

Hal : 2



Sambungan - - -



SEJUMLAH pekerja sedang menyelesaikan pembangunan Puskesmas Abiansemal I di Desa Blahkiuh, Abiansemal, Badung, Kamis (12/11). ● NUSABALI/YUDA

Menurut data terakhir, progres proyek baru 68 persen. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar 68,01 persen. Meski selisih sedikit, tapi Dessy mengaku apapun masih bisa terjadi. Ditanya penyebab keterlambatan proyek, Dessy mengaku disebabkan karena memang proyek dimulai belakangan. Saat kontrak lain sudah jalan, proyek Puskesmas Abiansemal baru mulai.

Rekanan sendiri tidak bisa mengejar proyek dengan cara lembur. "Lingkungan yang tidak memungkinkan. Pernah lembur sampai pukul 03.00 tapi mereka nggak berani," tukas mantan Kabag Pembangunan itu.

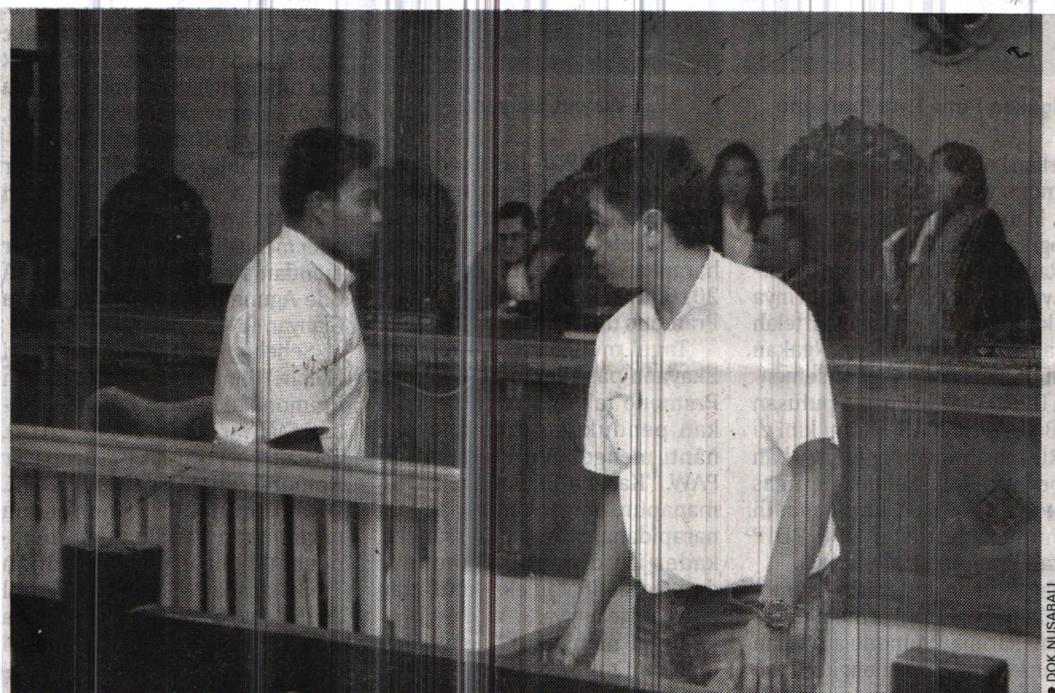
Mengenai sanksi penalti, tegas Dessy, akan dikenakan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai

kontrak. Contoh, proyek Pembangunan Puskesmas Abiansemal I jika telat, lanjut Dessy, denda sehari sebesar Rp 17 juta. "Tinggal menghitung berapa hari dia terlambat dikalikan 1/1000 atau Rp 17 juta itu," paparnya. Meski begitu, pihaknya baru mulai menyusun penalti pada awal Desember atau sebelum proyek jatuh tempo.

Berdasarkan pantauan kemarin, pengerjaan bagian atap belum rampung 100 persen sampai sekarang. Bahkan terlihat bila para pekerja masih berkutat pada proses finishing bagian gedung. Ironisnya, style Bali pada dinding bagian luar gedung pun sama sekali belum dikerjakan. Padahal pada bagian inilah pekerjaan yang paling membutuhkan waktu lama. **asa**



Korupsi Pavingisasi Jalan Gajah Mada, Denpasar ✓ Dua Terdakwa Sama-sama Divonis 1 Tahun



• DOK. NUSABALI

TERDAKWA, yaitu Alit Widhiadnyana AS (kiri) dan Ngurah Kosala Cakrawerthi (kanan) usai jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar pada 20 Oktober lalu.

DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus korupsi pavingisasi Jalan Gajah Mada, Denpasar, yaitu Alit Widhiadnyana AS dan Ngurah Kosala Cakrawerthi dihukum 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Kamis (12/11). Dalam putusan, majelis hakim juga memerintahkan jaksa mengembalikan kelebihan uang pengganti kerugian negara yang sudah dibayarkan terdakwa sebesar Rp 17 juta.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili menyatakan kedua terdakwa Alit Widhiadnyana sebagai

Direktur PT Alit Wirajaya dan Ngurah Kosala Cakrawerthi sebagai Direktur CV Unika Design bersalah sesuai pasal subsidi pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 jo pasal 55 ayat 1 KHUP.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan, yaitu kedua terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta hal meringankan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan putusannya untuk kedua terdakwa. "Menjatuhkan

kan pidana penjara selama satu tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsidi satu bulan penjara," tegas majelis hakim.

Selain itu, terdakwa Alit dijatuhi hukuman tambahan berupa mengganti kerugian negara Rp 193 juta. Namun karena terdakwa sudah menipiskan uang pengganti kerugian negara kepada jaksa Rp 210 juta, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan kelebihan pembayaran uang pengganti Rp 17 juta.

Putusan ini sendiri lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya, yaitu 1,5 tahun

Edisi : Jumat, 13 November 2015

Hal : 5



Sambungan . . .

penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan ditambah mengganti kerugian Negara Rp 220 juta. Usai sidang, baik JPU dan kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. "Kami masih pikir-pikir," ujar JPU usai sidang.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari penetapan Jalan Gajah Mada, Denpasar sebagai kawasan heritage. Selanjutnya dibangun pedestrian Jalan Gajah Mada dengan anggaran Rp 3,1 miliar. Setelah dilakukan tender, didapat pemenang PT Alit Wirajaya dengan penawaran Rp 2,5 miliar. Selain menetapkan pemenang tender PT Alit Wirajaya yang dipimpin Alit Widhiadnyana, juga ditetapkan konsultan pengawas CV Unika Desain yang dipimpin terdakwa Ngurah Kosala Cakrawerti dengan nilai kontrak Rp 49,9 juta. Penyelewengan mulai terjadi saat proyek dilaksanakan.

Pasalnya dalam pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan perencanaan atau DED (Detail Engineering Design). Di antaranya dengan adanya perubahan volume karena tidak dipasangnya paving di atas jembatan Jalan Gajah Mada. Atas pekerjaannya ini PT Alit Wirajaya menerima pembayaran hingga Rp 22 miliar lebih. Namun dari hasil audit BPKP Wilayah Bali ditemukan realisasi anggaran negara Rp 2,2 miliar sementara nilai fisik yang diterima hanya Rp 2 miliar lebih. Sehingga ada kerugian negara Rp 210.541.795. rez



Nunggak PHR Miliaran, Minta Pengurangan

'Kalau sampai minta pengurangan pajak, itu aneh. Karena tingkat hunian mereka tinggi. Lagipula pajak itu kan dibayar konsumen, bukan hotel itu sendiri,'

(Komisi I DPRD Buleleng)

SINGARAJA, NusaBali

Sejumlah hotel di kawasan wisata Bali Utara mengajukan pengurangan pajak hotel dan restoran (PHR) di tahun 2015. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 700 juta. Alasannya, beban pajak itu dianggap terlalu tinggi sementara

hunian tidak selalu penuh.

Informasinya, tunggakan PHR hingga tahun 2015 ini mencapai sekitar Rp 2 miliar. Dari tunggakan itu, kini sejumlah hotel mengajukan permohonan pengurangan pajak. Permohonan itu telah disampaikan kepada Dinas Pendapatan.

Namun lembaga DPRD Buleleng minta kepada Pemkab menolak permohonan tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Hj Mulyadi Putra Kamis (12/11) mengakui, ada beberapa hotel terutama di wilayah Kecamatan Gerokgak yang mengajukan permohonan pengurangan pajak.

Mulyadi mengaku heran karena hotel di wilayah Gerogak rata-rata tingkat huniannya tinggi. Mulyadi pun meminta agar Dinas Pendapatan (Dispenda) sebagai kepanjangan Pemkab Buleleng menolak permohonan tersebut.

"Kami heran kenapa mereka

mengajukan permohonan seperti itu. Kami ingin pemerintah menolaknya. Kalau sampai minta pengurangan pajak, itu aneh. Karena tingkat hunian mereka tinggi. Lagipula pajak itu kan dibayar konsumen, bukan hotel itu sendiri," kata Mulyadi.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Ida Bagus Puja Erawan secara terpisah mengakui telah menerima permohonan pengurangan pajak atau retitusi PHR dari sejumlah hotel terutama hotel yang ada di kawasan wisata di wilayah Kecamatan Gerokgak.

Puja Erawan menegaskan pihaknya tidak punya kewenangan mengurangi PHR yang mesti dibayar hotel dan restoran. "Logikanya, konsumen itu kan sudah bayar pajak ke hotel dan restoran. Konsumen itu kan menitipkan pajaknya ke hotel. Selanjutnya, hotel tinggal melanjutkan penyetoran

pajak itu ke pemerintah," tegasnya.

Meski demikian pemerintah tetap memberikan peluang kepada wajib pajak itu melakukan pembayaran kepada pemerintah dengan sistem mencicil. "Peluang yang bisa kami berikan ya hanya itu. Mencicil saja. Kalau mengurung, apalagi menghapuskan, itu justru pemerintah yang salah," imbuhnya.

Nantinya Dispenda mengklaim akan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengelola hotel dan restoran. Agar kedepannya mereka disiplin melakukan penyetoran pajak kepada daerah. Mengingat pajak yang dibayar konsumen dan dititipkan kepada hotel atau restoran, tetap harus disetorkan pada pemerintah.

Sebelumnya diberitakan, pencapaian target dari PHR, ternyata masih sering menemui hambatan. Padahal PHR itu adalah tumpuan utama dalam peningkatan penda-

patan asli daerah (PAD).

Dalam beberapa kasus, pencapaian target PHR sering terbentur munculnya tunggakan akibat pihak pengelolaan hotel dan restoran tidak transparan dalam menyampaikan pajak. Sering pula ada faktor kesengajaan pihak pengelola hotel dan restoran tidak melunasi pajaknya. Kondisi itu hampir terjadi setiap tahun. Dan di tahun 2015, kondisi itu dikawatir akan terjadi tunggakan kembali.

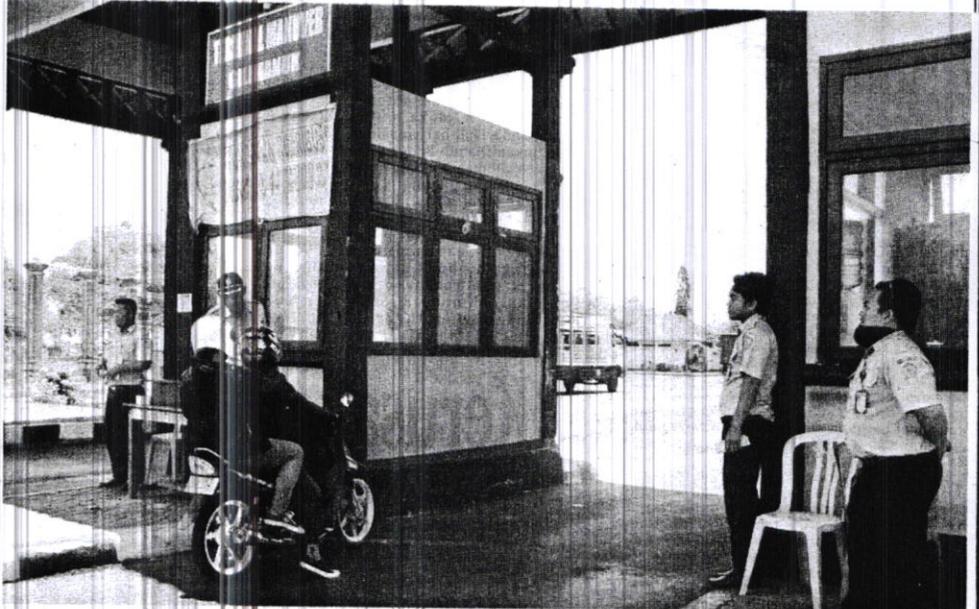
Dinas Pendapatan (Dispeda) Buleleng menyebut, di tahun 2014 saja, tunggakan PHR mencapai Rp 2,4 miliar. Tunggakan itu baru bisa dipungut di tahun 2015. Hingga memasuki pertengahan tahun, tunggakan itu baru bisa dipungut hingga Rp 1,6 miliar. Dispenda pun janji sisa tunggakan sebesar Rp 800 juta itu bisa dipungut hingga akhir tahun 2015. **k19**



Retribusi Terminal Manuver Diduga Bocor

★ Oknum Dishubkominfo Dituding Loloskan Kendaraan

Perusda menempatkan tenaga khusus untuk arahkan kendaraan menuju terminal manuver, termasuk tempatkan mata-mata guna mengawasi kinerja petugas khusus tersebut.



NEGARA, NusaBali

Target pendapatan retribusi di Terminal Manuver Gilimanuk untuk tahun 2015 sebesar Rp 1.992.332.000 pesimis tercapai. Pasalnya, hingga bulan September jumlah pemasukan hanya Rp 905.564.000. Target pendapatan tak tercapai diduga disebabkan adanya pungutan liar (pungli) di candi bentar pertigaan menuju loket Pelabuhan Gilimanuk. Dinas Pendapatan (Dispenda) Jembrana pun menekan Perusda Jembrana agar bisa capai target retribusi.

Informasi di lapangan, oknum pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) yang berjaga di candi bentar atau pertigaan menuju loket Pelabuhan Gilimanuk sering diberikan jalan lurus dikenai cuk dan uangnya masuk kantong. Sehingga uang retribusi tidak tercatat melainkan masuk kantong oknum pegawai Dishubkominfo.

Pelaksana tugas (Plt) Perusda Jembrana, I Made Sudantra membenarkan target pemasukan Pendapatan Asli

PETUGAS berikan karcis kepada pengendara motor yang memasuki Terminal Manuver Pelabuhan Gilimanuk.

• DOK.NUSABALI

Daerah (PAD) dari pos retribusi di Terminal Manuver optimis tercapai. Sudantra mengaku sempat mengamati secara langsung untuk mengetahui penyebab kebocoran di Terminal Manuver. Ia pun menyaksikan pungutan Rp 1.000 per motor, Rp 2.000 per mobil, dan Rp 3.000 per kendaraan besar, tidak semua masuk ke Terminal Manuver. "Lihat ada sekitar 10 kendaraan, bisa ada 5 unit yang tidak diarahkan masuk Terminal Manuver. Jelas ini jadi penyebab target retribusi tidak tercapai," dugaanya, Kamis (12/11).

Sudantra berupaya melakukan evaluasi dengan menempatkan seorang petugas jaga

khusus dari Perusda di pos pertigaan gerbang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Petugas jaga khusus yang ditempatkan per Senin (2/11) bertugas mengarahkan setiap kendaraan agar masuk menuju parkir manuver. Selain itu, pihaknya juga menempatkan petugas untuk memata-matai petugas jaga khusus tersebut. "Terbukti setelah kami tempatkan petugas jaga, ada peningkatan retribusi Rp 500 ribu sampai Rp 800 ribu per hari. Kalau biasanya rata-rata Rp 3,5 juta per hari, sekarang naik jadi Rp 4 juta hingga Rp 4,3 juta per hari," ujarnya.

Sementara Kadis Hubkominfo Jembrana, Gusti Ba-

Edisi : Jum'at, 13 November 2015

Hal : 7



Sambungan . . .

gus Ngurah Putra Riyadi membantah adanya dugaan pungli dari pegawainya. Menurutnya, setiap hari ada 4 petugas jaga berstatus kontrak dengan 1 kepala regu berstatus PNS ditempatkan di pos dekat candi bentar masuk Pelabuhan Gilimanuk. Mereka diyakini tidak akan berani berbuat macam-macam, karena pengawasan sudah terus dilakukan termasuk dengan memasang CCTV di sekitar pos.

Diakui saat-saat tertentu, seperti antrean panjang, rombongan konvoi, diarahkan lurus langsung menuju loket Pelabuhan Gilimanuk dengan pertimbangan kelancaran arus lalu lintas. Namun ketika arus

lancar, petugasnya diwajibkan mengarahkan kendaraan masuk menuju Terminal Manuver. Jika ada yang berani melakukan pungli dan terbukti, dipastikan diberikan sanksi berat. "Jika kontrak bisa langsung kami berhentikan," katanya.

Berdasar data Dispenda Jembrana, pendapatan dari pos parkir Terminal Manuver pada tahun 2014 dari target Rp 1.730.089.000, terealisasi Rp 1.387.632.000. Tahun 2015 pasang target Rp 1.992.332.000, hingga bulan September baru terealisasi Rp 905.564.000. Melihat capaian sementara, kemungkinan besar target tahun ini kembali tidak terpenuhi. **ode**



Vila di Tepi Pantai Banyak Tanpa IMB



● IST
SALAH satu vila di Jembrana yang melanggar sempadan pantai.

NEGARA, NusaBali

Sejumlah hotel dan vila di Kabupaten Jembrana dicurigai banyak yang belum punya izin alias bodong namun telah beroperasi. Akomodasi pariwisata bodong itu disinyalir banyak terdapat di tepi pantai. Dari catatan Bidang Pariwisata Dinas Dikporaparbud Jembrana terdapat 89 hotel maupun vila yang sudah memiliki izin lengkap.

Dari 89 hotel dan vila yang legal, 24 di antaranya berada di wilayah Kecamatan Pekutatan, 21 di Kecamatan Negara, 18 di Kecamatan Melaya, 15 di Kecamatan Jembrana, dan 11 di Kecamatan Mendoyo. Hotel dan vila berizin ini kebanyakan berada di kawasan perkotaan. Padahal, dalam perkembangan belakangan ini, lebih banyak investor melirik pembangunan pondok wisata di tepi pantai, seperti di Jembrana, Melaya, dan Pekutatan.

Tak jarang ditemui di beberapa desa di ketiga wilayah tersebut berjejer hotel maupun vila, dan beberapa memang belum keluar izinnya. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Jembrana, I Komang Suparta membenarkan, masih ada sejumlah pondok wisata di kawasan pantai yang belum memiliki izin, khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Masalah utama memang karena aturan sempadan pantai, sesuai Perda RTRW Bali diatur jarak bangunan minimal 100 meter dari titik air pasang pantai. "Kalau dulu memang masih ada aturan jarak bisa ditoleransi 50 meter. Tapi yang sekarang tidak ada pengecualian lagi," katanya, Kamis (12/11).

Namun dalam rancangan Perda RTRB Bali yang masih dibahas di Pemprov Bali, katanya, ada wacana untuk kembali memberikan toleransi jarak sempadan pantai. Namun kepastiannya juga belum diketahui. "Yang pasti kami hanya mengikuti aturan saja. Kalau memang sudah mepet dengan garis pantai, pasti sudah tidak ada izin. Kecuali yang memang sudah lama, sebelum ada Perdanya," ujarnya. **ode**

Edisi : Jumat, 13 November 2015

Hal : 7